



Pariwisata Berkelanjutan dan Regeneratif: Reorientasi Pembangunan Pariwisata di Era Pasca-Pandemi

Ahmad Sadam Anggaraksa
Udayana University, Indonesia;

*Corresponding author: sadamanggaraksa@gmail.com

Article submitted: 8th October 2025 ; Accepted: 14th November 2025 ; Published 31st December 2025

Abstract

This study explores the paradigm shift from sustainable tourism, which emphasizes minimizing environmental and social harm, to regenerative tourism, which seeks to actively restore and enhance ecosystems and community well-being. Using a qualitative, literature-based research design, the study systematically reviews peer-reviewed journals, policy documents, and international reports published between 2019 and 2025. The findings reveal that regenerative tourism represents a transformative approach that integrates ecological restoration, social inclusion, and circular economic innovation. Empirical examples from Southeast Asia, such as Indonesia and Thailand, demonstrate that community participation and collaborative governance are critical for success. However, challenges remain in measuring regenerative outcomes, aligning cross-sectoral policies, and bridging knowledge gaps. Academically, this research contributes to the theoretical integration of sustainability, systems, and regenerative development; practically, it offers policy directions for building resilient and inclusive tourism systems in the post-pandemic era.

Keywords: regenerative tourism; sustainable tourism; collaborative governance; circular economy; Southeast Asia

1. Introduction

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi global paling dinamis, berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat interaksi lintas budaya. Namun, pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang mengungkap kerentanan sistem pariwisata global yang selama ini bergantung pada pertumbuhan masif dan eksploitasi sumber daya alam. Krisis tersebut memaksa para pemangku kepentingan—pemerintah, industri, dan masyarakat—untuk meninjau ulang paradigma pembangunan pariwisata konvensional. Di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi, muncul kesadaran bahwa model pertumbuhan yang berfokus pada kuantitas wisatawan tidak lagi relevan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal (Hughes & Scheyvens, 2022).

Istilah *pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism)* pertama kali muncul seiring dengan terbitnya *Brundtland Report* tahun 1987 yang menekankan konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip ini kemudian diadopsi secara



luas dalam kebijakan dan praktik pariwisata global. Akan tetapi, implementasinya sering kali hanya sebatas slogan dan tidak jarang menimbulkan paradoks: pariwisata yang diklaim “berkelanjutan” justru mempercepat kerusakan lingkungan, meningkatkan ketimpangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat (Niewiadomski, 2020). Dalam konteks inilah, konsep *pariwisata regeneratif* (*regenerative tourism*) hadir sebagai paradigma baru yang lebih radikal, bukan hanya berupaya meminimalkan dampak negatif, melainkan secara aktif berkontribusi terhadap pemulihan dan regenerasi ekosistem sosial maupun alam (Benessaiah & Boley, 2023).

Perbedaan mendasar antara pariwisata berkelanjutan dan pariwisata regeneratif terletak pada orientasi dan nilai yang diusung. Jika keberlanjutan menekankan upaya mempertahankan keseimbangan, maka regenerasi berfokus pada proses memperbaharui, memperbaiki, dan menumbuhkan kembali sistem kehidupan yang telah rusak akibat aktivitas manusia (Mang & Haggard, 2020). Dengan kata lain, pariwisata regeneratif menempatkan manusia bukan sebagai pengendali alam, melainkan sebagai bagian integral dari sistem ekologis yang saling bergantung satu sama lain (Raworth, 2017). Paradigma ini berangkat dari teori sistem hidup dan pemikiran ekonomi donat yang menekankan bahwa kesejahteraan manusia harus berada dalam batas-batas ekologis bumi. Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti destinasi wisata tidak hanya harus beroperasi secara ekonomis, tetapi juga harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial komunitas lokal.

Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi contoh konkret betapa pentingnya transformasi ini. Sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang tinggi, Asia Tenggara telah lama bergantung pada sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Namun, ketergantungan tersebut justru memunculkan berbagai persoalan baru seperti overtourism, degradasi lingkungan, dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi (Mekinc & Potočnik Topler, 2021). Sebelum pandemi, destinasi populer seperti Bali, Phuket, dan Boracay menghadapi tekanan serius akibat ledakan wisatawan dan pembangunan tidak terkendali. Pandemi kemudian memaksa berhentinya aktivitas wisata secara mendadak, yang di satu sisi menimbulkan krisis ekonomi, namun di sisi lain memberikan waktu bagi alam untuk pulih. Banyak penelitian mencatat penurunan polusi udara, peningkatan kualitas air laut, dan kembalinya satwa liar selama masa lockdown (UNWTO, 2023). Fenomena ini menjadi momentum reflektif untuk menata ulang arah kebijakan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan regeneratif.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan *pariwisata berkualitas dan berkelanjutan* kini menjadi agenda utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah melalui *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)* menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan (Kemenparekraf, 2023). Namun, dalam praktiknya, pendekatan keberlanjutan sering kali masih bersifat normatif dan administratif, belum menyentuh transformasi nilai dan perilaku yang menjadi inti dari pariwisata regeneratif. Misalnya, destinasi super prioritas seperti Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang masih menghadapi persoalan ketimpangan partisipasi masyarakat lokal dan lemahnya mekanisme perlindungan ekologis. Oleh karena itu, penerapan prinsip regeneratif menjadi langkah lanjutan yang tidak hanya mengatur dampak, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial-ekologis suatu destinasi agar mampu memulihkan diri secara alami setelah menerima tekanan wisata (Pollock, 2019).

Selain itu, pariwisata regeneratif menuntut perubahan mendasar dalam cara pandang pelaku industri dan wisatawan. Wisatawan tidak lagi diposisikan sekadar



konsumen pengalaman, tetapi sebagai *co-creators* yang turut menjaga, memelihara, dan memperbaharui destinasi yang mereka kunjungi (Ateljevic, 2021). Ini menuntut pendekatan edukatif yang lebih mendalam melalui interpretasi wisata, pengelolaan berbasis komunitas, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular. Industri perhotelan, misalnya, mulai mengadopsi prinsip *zero waste*, efisiensi energi, dan sistem pertanian organik lokal untuk mendukung rantai pasok yang rendah karbon (Gössling & Hall, 2021). Lebih dari itu, beberapa hotel dan operator tur di Bali, Lombok, dan Raja Ampat kini menjalankan program restorasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, serta konservasi keanekaragaman hayati sebagai bagian integral dari model bisnis mereka (UNDP Indonesia, 2024). Pendekatan seperti ini mencerminkan pergeseran dari *doing less harm* menuju *doing more good*—dari mitigasi menuju regenerasi.

Dari sisi teori, pendekatan regeneratif juga berakar pada paradigma ekologi dalam ilmu sosial yang menekankan *resilience thinking*. Holling (1973) memperkenalkan konsep *resilience* sebagai kemampuan sistem untuk beradaptasi dan pulih setelah mengalami gangguan. Dalam konteks pariwisata, resiliensi tidak hanya diukur dari seberapa cepat destinasi kembali menerima wisatawan, melainkan seberapa besar kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, bencana, atau fluktuasi pasar tanpa kehilangan integritas sosial dan ekologis (Lew et al., 2020). Dengan demikian, pengembangan pariwisata regeneratif juga berarti membangun sistem yang adaptif, inklusif, dan saling terhubung antara aktor manusia, alam, dan teknologi.

Transformasi menuju pariwisata regeneratif memerlukan komitmen kolaboratif antar pihak. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator; industri menjadi motor inovasi dalam penerapan praktik hijau; sementara masyarakat lokal menjadi inti dari regenerasi sosial dan kultural. Sinergi ini dapat diperkuat melalui mekanisme tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), transparansi data, dan model bisnis inklusif berbasis komunitas (Cave & Dredge, 2020). Misalnya, model *community-based regenerative tourism* yang dikembangkan di New Zealand dan Costa Rica terbukti mampu mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Model serupa kini mulai diadaptasi di beberapa wilayah Indonesia seperti Nusa Penida, Toba, dan Sumba, dengan dukungan organisasi non-pemerintah dan akademisi (Pawson et al., 2022).

Namun, tantangan implementasi pariwisata regeneratif tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, dibutuhkan indikator dan instrumen evaluasi yang mampu mengukur proses regeneratif secara akurat, tidak hanya pada tingkat output ekonomi tetapi juga outcome ekologis dan sosial. Di sisi lain, masih terjadi kesenjangan literasi dan kapasitas antar aktor pariwisata dalam memahami dan menerapkan prinsip regenerasi (Prayudi & Sari, 2023). Oleh karena itu, penelitian empiris dan kolaboratif diperlukan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang aplikatif serta mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat direplikasi di berbagai destinasi.

Secara akademik, studi ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antara keberlanjutan dan regenerasi dalam konteks pariwisata tropis di Asia Tenggara. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi dasar perumusan strategi pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tetapi juga memperkuat fondasi ekologis dan sosial jangka panjang. Dengan demikian, pariwisata tidak lagi sekadar aktivitas ekonomi, melainkan proses kolektif untuk memulihkan keseimbangan antara manusia dan alam dalam semangat harmoni dan keberlanjutan.



2. Literature Review

Kajian literatur mengenai pariwisata berkelanjutan dan regeneratif menunjukkan adanya evolusi konseptual yang signifikan dalam cara pandang terhadap pembangunan pariwisata. Sejak diperkenalkannya konsep *sustainable tourism* pada akhir 1980-an, fokus utama penelitian lebih banyak diarahkan pada upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, tanpa benar-benar menyentuh dimensi pemulihan atau *healing capacity* dari ekosistem yang terdampak (Niewiadomski, 2020).

Literatur awal menekankan prinsip *three pillars of sustainability*—ekonomi, sosial, dan lingkungan—namun dalam praktiknya, aspek ekonomi kerap mendominasi kebijakan pariwisata, sedangkan dimensi sosial dan ekologis sering kali terpinggirkan (Bramwell & Lane, 2015). Kondisi ini kemudian menimbulkan ketidakseimbangan struktural dalam tata kelola destinasi yang mengarah pada fenomena *greenwashing* dan *overtourism*.

Sejumlah penelitian pasca-pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pendekatan keberlanjutan tradisional tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas krisis global saat ini. Hughes dan Scheyvens (2022) menegaskan bahwa pandemi menciptakan peluang untuk *reset* sistem pariwisata menuju bentuk yang lebih adil dan regeneratif. Mereka mengemukakan bahwa keberlanjutan selama ini terlalu fokus pada mitigasi, bukan transformasi. Sementara itu, Benessaiah dan Boley (2023) memperkenalkan kerangka *regenerative tourism* yang berakar pada teori ekologi sosial dan ekonomi sirkular, yang bertujuan menciptakan sistem pariwisata yang tidak hanya bertahan (*resilient*), tetapi juga berkontribusi pada pembaruan sosial dan ekologis. Dengan demikian, konsep regeneratif bukan sekadar perpanjangan dari keberlanjutan, melainkan paradigma baru yang berfokus pada peningkatan kapasitas hidup sistem yang terlibat.

Dari sisi praktik, studi oleh Gössling dan Hall (2021) menggarisbawahi perubahan paradigma dalam industri perhotelan dan perjalanan setelah pandemi. Mereka menemukan bahwa hotel dan operator tur yang mengintegrasikan prinsip efisiensi energi, nol limbah (*zero waste*), dan sumber daya lokal berkelanjutan menunjukkan tingkat pemulihan ekonomi dan kepercayaan pelanggan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik regeneratif tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi strategis. Demikian pula, Pawson et al. (2022) dalam penelitiannya tentang pariwisata komunitas di Selandia Baru menunjukkan bahwa model *community-based regenerative tourism* berhasil memperkuat ketahanan sosial dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap destinasi di kalangan masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan kolaborasi lintas aktor—antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta—sebagai prasyarat keberhasilan regenerasi.

Beberapa kajian regional di Asia Tenggara juga menyoroti dinamika dan tantangan implementasi konsep regeneratif dalam konteks tropis. Mekinc dan Potočnik Topler (2021) dalam studinya mengenai kebijakan pariwisata pasca-pandemi di ASEAN menyatakan bahwa sebagian besar negara di kawasan ini masih berada pada tahap transisi dari kebijakan berorientasi ekonomi menuju kebijakan berorientasi kesejahteraan ekologis. Mereka menekankan bahwa resistensi terhadap perubahan sering kali muncul akibat struktur industri yang masih sangat terpusat pada kapital global dan orientasi jangka pendek terhadap pendapatan wisata. Di sisi lain, studi Prayudi dan Sari (2023) di Indonesia mengidentifikasi adanya *knowledge gap* antara pemahaman akademik tentang pariwisata regeneratif dan kemampuan pelaku pariwisata lokal untuk mengimplementasikannya. Minimnya indikator kuantitatif dan instrumen evaluasi juga menjadi kendala serius dalam mengukur tingkat keberhasilan program regeneratif.



Secara teoritis, literatur terbaru mengaitkan pariwisata regeneratif dengan konsep *resilience* dan *systems thinking*. Lew et al. (2020) menegaskan bahwa pendekatan sistemik memungkinkan pengelola destinasi untuk memahami keterkaitan antarunsur sosial, ekonomi, dan ekologis secara lebih holistik. Dalam kerangka *resilience thinking*, keberhasilan sebuah destinasi tidak lagi diukur dari jumlah wisatawan atau pendapatan, melainkan dari kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial tanpa kehilangan fungsi dan identitasnya. Pendekatan ini kemudian diperdalam oleh Ateljevic (2021) yang menyatakan bahwa regenerasi adalah bentuk “transformative tourism”, yaitu praktik wisata yang memulihkan relasi manusia dengan alam melalui kesadaran etis dan spiritual. Ia berpendapat bahwa pariwisata regeneratif adalah proses belajar kolektif yang menghubungkan kembali nilai-nilai budaya lokal dengan visi global tentang keberlanjutan.

Dari perspektif kebijakan publik, dokumen *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)* yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023) telah menegaskan arah pembangunan pariwisata nasional menuju prinsip keberlanjutan. Namun, dalam analisis Cave dan Dredge (2020), bentuk tata kelola yang terlalu birokratis sering kali menghambat munculnya inovasi regeneratif di tingkat akar rumput. Mereka menekankan pentingnya *diverse economic practices*, yaitu keragaman model ekonomi berbasis komunitas, koperasi, dan kewirausahaan sosial yang dapat mendukung pariwisata regeneratif di tingkat lokal. Dalam hal ini, sistem *collaborative governance* dipandang lebih adaptif karena mengakomodasi berbagai kepentingan dan mengandalkan kepercayaan serta dialog antar pemangku kepentingan (Reed et al., 2021).

Studi empiris UNDP Indonesia (2024) juga menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan, sosial, dan teknologi dalam pembangunan pariwisata regeneratif. Program *Sustainable and Regenerative Tourism Initiative* di Bali dan Lombok, misalnya, berhasil menurunkan emisi karbon hingga 20% dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata berbasis konservasi. Hasil ini memperlihatkan potensi nyata dari pendekatan regeneratif untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan konservasi. Namun, laporan tersebut juga mengakui bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keberlanjutan pendanaan, kapasitas teknis masyarakat, serta komitmen lintas sektor untuk menjaga kesinambungan program.

Meskipun literatur mengenai pariwisata regeneratif berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, terdapat beberapa *research gap* yang perlu diidentifikasi. Pertama, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek konseptual dan belum banyak menguji efektivitas model regeneratif dalam konteks empiris, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, belum ada konsensus mengenai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak regeneratif secara komprehensif, baik dalam dimensi ekologis, sosial, maupun ekonomi (Prayudi & Sari, 2023). Ketiga, keterbatasan data longitudinal dan kurangnya kolaborasi lintas disiplin menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi jangka panjang terhadap perubahan yang dihasilkan oleh intervensi regeneratif. Keempat, sebagian penelitian masih bersifat deskriptif dan belum menyentuh dimensi transformasional yang menjadi inti dari regenerasi, yaitu bagaimana praktik pariwisata mampu mengubah sistem nilai dan perilaku masyarakat menuju harmoni ekologis (Benessaiah & Boley, 2023).

Dalam konteks keilmuan, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan regenerasi ke dalam praktik pariwisata di negara berkembang. Kebanyakan studi terdahulu



dilakukan di negara maju seperti Selandia Baru, Australia, atau Eropa Barat, di mana infrastruktur dan kesadaran ekologis masyarakat relatif tinggi (Pawson et al., 2022). Oleh karena itu, kajian empiris di kawasan ASEAN menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep regeneratif dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan politik yang khas. Selain itu, penelitian ini juga mendesak untuk memperluas fokus dari *environmental sustainability* ke arah *cultural and social regeneration*, mengingat bahwa keberlanjutan sejati tidak dapat dipisahkan dari pelestarian nilai-nilai lokal, tradisi, dan relasi komunitas terhadap lingkungan mereka (Ateljevic, 2021).

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatan multidimensi yang menggabungkan teori sistem, ekonomi sirkular, dan perspektif antropologis dalam memahami pariwisata regeneratif. Pendekatan ini tidak hanya menilai pariwisata sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai praktik sosial dan budaya yang dapat menjadi sarana penyembuhan kolektif (*collective healing*). Dalam konteks pasca-pandemi, pariwisata regeneratif menjadi ruang untuk menata ulang hubungan manusia dengan alam, memperkuat solidaritas sosial, serta mengembalikan nilai spiritualitas yang sering hilang dalam industri pariwisata modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model pembangunan pariwisata yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada regenerasi kehidupan.

3. Method and Theory

Pendekatan penelitian terhadap pariwisata berkelanjutan dan regeneratif menuntut kerangka metodologis yang bersifat holistik, reflektif, dan kontekstual. Hal ini karena isu-isu regeneratif tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga dengan dimensi sosial, kultural, dan spiritual yang saling berinteraksi dalam sistem destinasi wisata. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*literature-based research design*) yang berfokus pada analisis sistematis terhadap literatur ilmiah terkini tentang praktik dan teori pariwisata regeneratif di tingkat global dan regional.

Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk menggali pola konseptual, membandingkan model-model penerapan pariwisata regeneratif, dan mengidentifikasi kesenjangan empiris yang masih ada dalam penerapan konsep tersebut di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyusun kerangka konseptual yang menjembatani teori keberlanjutan dengan paradigma regenerasi dalam konteks pembangunan pariwisata pasca-pandemi.

Metode penelitian kualitatif berbasis literatur juga memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap relasi antar konsep dan teori yang telah dibahas dalam bagian tinjauan pustaka sebelumnya. Melalui proses triangulasi sumber, analisis tematik, serta interpretasi kritis terhadap literatur, penelitian ini tidak hanya menguraikan kecenderungan penelitian terdahulu tetapi juga mengembangkan pemahaman teoretis yang lebih luas mengenai arah baru pembangunan pariwisata yang adil, inklusif, dan regeneratif (Creswell & Poth, 2018).

Selain itu, pendekatan ini dipilih karena relevan dengan sifat konseptual dari isu pariwisata regeneratif yang masih relatif baru dalam diskursus akademik. Pengumpulan data bersumber dari jurnal bereputasi seperti *Tourism Geographies*, *Journal of Sustainable Tourism*, *Annals of Tourism Research*, dan *Sustainability*. Semua artikel yang digunakan



dipublikasikan dalam rentang waktu 2019–2025 untuk menjamin keterbaruan kajian. Analisis data dilakukan dengan membangun matriks konseptual yang menghubungkan tema-tema utama, seperti: (1) prinsip pariwisata berkelanjutan, (2) konsep regeneratif dan praktiknya, (3) model tata kelola partisipatif, serta (4) indikator keberhasilan regeneratif dalam konteks sosial-ekologis.

3.1 Method

Penelitian ini menggunakan desain studi pustaka (*library research design*) yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Desain ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis kritis terhadap teori, model, dan hasil riset empiris yang telah ada. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, kemudian melakukan interpretasi untuk menemukan makna dan pola baru (Creswell & Creswell, 2018).

Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat eksploratif dan interpretatif, bertujuan menggali pemahaman mendalam tentang makna dan implementasi pariwisata regeneratif dalam konteks kebijakan dan praktik di kawasan Asia Tenggara. Analisis difokuskan pada literatur ilmiah dari tahun 2019 hingga 2025 agar hasil penelitian mencerminkan kondisi dan perkembangan terkini.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua tahap: (1) identifikasi literatur melalui basis data ilmiah seperti *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *Google Scholar*, menggunakan kata kunci “sustainable tourism”, “regenerative tourism”, “post-pandemic tourism recovery”, dan “community-based tourism resilience”; dan (2) seleksi literatur berdasarkan relevansi dan kualitas akademik. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal yang *peer-reviewed*, buku akademik, dan laporan organisasi internasional (misalnya UNWTO dan UNDP).

Sampel dan Sumber Data

Dari proses penyaringan, diperoleh 45 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria relevansi dan kualitas. Artikel tersebut mencakup berbagai konteks geografis—Eropa, Oceania, dan Asia Tenggara—dengan fokus khusus pada implementasi pariwisata regeneratif di destinasi tropis. Selain sumber internasional, penelitian ini juga mengacu pada dokumen kebijakan nasional seperti *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)* (Kemenparekraf, 2023) untuk memberikan konteks Indonesia yang lebih kuat.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah lembar analisis dokumen yang dikembangkan secara mandiri berdasarkan indikator yang disarikan dari teori keberlanjutan dan regenerasi. Lembar tersebut memuat beberapa dimensi analisis, yaitu:

- (1) prinsip dasar regeneratif (restorasi, inklusivitas, dan keseimbangan ekologis),
- (2) bentuk implementasi (komunitas, kebijakan, industri, wisatawan),
- (3) dampak sosial-ekonomi dan ekologis, serta
- (4) tantangan implementasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan induktif. Setiap sumber literatur dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan subtema yang muncul secara berulang. Hasilnya kemudian dikategorikan dalam empat kluster utama: (a) dimensi teoritis keberlanjutan, (b) transformasi menuju regenerasi, (c) kebijakan dan praktik di Asia Tenggara,



serta (d) arah masa depan pariwisata regeneratif. Validitas analisis dijaga melalui proses triangulasi sumber dan perbandingan lintas penelitian.

Analisis Kritis

Selain deskripsi, penelitian ini juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan pariwisata regeneratif di berbagai konteks. Misalnya, studi Pawson et al. (2022) di Selandia Baru menunjukkan keberhasilan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam model *community-led regeneration*, sedangkan studi Prayudi dan Sari (2023) di Indonesia menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan kapasitas antar pelaku pariwisata dalam memahami prinsip regenerasi. Analisis semacam ini membantu memetakan posisi Indonesia dalam wacana global mengenai regeneratif dan menunjukkan arah pengembangan penelitian lanjutan.

Dengan desain metodologis ini, penelitian tidak hanya memberikan gambaran konseptual, tetapi juga mengajukan sintesis ilmiah yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan dan strategi implementasi pariwisata regeneratif di masa depan.

3.2 Theory

Kerangka teori penelitian ini berakar pada tiga landasan utama: (1) teori keberlanjutan (*sustainability theory*), (2) teori sistem dan resiliensi (*systems and resilience theory*), serta (3) teori pembangunan regeneratif (*regenerative development theory*). Ketiganya membentuk dasar epistemologis untuk memahami bagaimana pariwisata dapat bertransformasi dari model eksploitatif menuju sistem yang memulihkan kehidupan sosial dan ekologis.

1. Teori Keberlanjutan (Sustainability Theory)

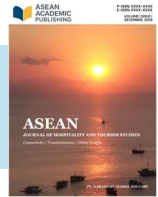
Teori keberlanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pariwisata, teori ini menjelaskan bahwa pembangunan destinasi harus memperhitungkan daya dukung ekologis serta kesejahteraan masyarakat lokal (Bramwell & Lane, 2015). Namun, teori ini juga dikritik karena cenderung mempertahankan status quo, tidak mendorong perubahan struktural terhadap sistem pariwisata global yang eksploitatif (Hughes & Scheyvens, 2022). Oleh karena itu, teori keberlanjutan menjadi pijakan awal yang perlu dikembangkan lebih jauh ke arah paradigma regeneratif.

2. Teori Sistem dan Resiliensi (Systems and Resilience Theory)

Teori sistem memberikan perspektif bahwa destinasi pariwisata merupakan sistem adaptif kompleks yang terdiri dari elemen sosial, ekonomi, dan ekologis yang saling berinteraksi (Lew et al., 2020). *Resilience theory* (Holling, 1973) kemudian memperluas konsep ini dengan menekankan kemampuan sistem untuk pulih dan beradaptasi setelah mengalami gangguan. Dalam kerangka ini, pariwisata tidak lagi dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi sebagai sistem sosial-ekologis yang harus mampu beradaptasi terhadap perubahan global seperti krisis iklim dan pandemi. Pendekatan sistemik ini sangat penting dalam konteks regeneratif karena memungkinkan pemahaman terhadap dinamika perubahan dan hubungan timbal balik antar komponen destinasi wisata.

3. Teori Pembangunan Regeneratif (Regenerative Development Theory)

Teori pembangunan regeneratif, sebagaimana dikemukakan oleh Mang dan Haggard (2020), berpandangan bahwa setiap sistem kehidupan memiliki potensi untuk memperbaharui dirinya sendiri. Prinsip utama teori ini adalah bahwa kegiatan manusia, termasuk pariwisata, seharusnya tidak hanya menghindari kerusakan lingkungan, tetapi juga berkontribusi aktif pada pemulihan dan peningkatan



kapasitas ekologis bumi. Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari seberapa besar sistem tersebut mampu menumbuhkan kehidupan secara berkelanjutan (*to grow the conditions for life to thrive*).

Teori ini menempatkan manusia sebagai bagian integral dari alam, bukan entitas terpisah. Oleh sebab itu, hubungan manusia–lingkungan dalam pariwisata regeneratif harus dibangun di atas nilai-nilai empati, kolaborasi, dan tanggung jawab ekologis. Ateljevic (2021) menegaskan bahwa regenerasi menuntut transformasi kesadaran, di mana wisatawan, pengelola, dan masyarakat lokal menjadi *co-creators* dalam proses pembaruan destinasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *doughnut economics* yang dikemukakan oleh Raworth (2017), yang menekankan bahwa kesejahteraan manusia harus berada dalam batas-batas ekologis planet.

Sintesis Teoritis

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan paradigma baru pariwisata. Teori keberlanjutan memberikan dasar etis dan kebijakan, teori sistem menjelaskan dinamika dan hubungan antar elemen, sedangkan teori regeneratif memberikan arah normatif dan tujuan akhir dari transformasi pariwisata. Dalam konteks penelitian ini, integrasi ketiganya membentuk model konseptual yang disebut *Sustainable-Regenerative Tourism Framework (SRTF)*, yaitu kerangka yang menggabungkan prinsip keberlanjutan (stabilitas sistem) dengan prinsip regenerasi (pertumbuhan kehidupan). Model ini menghubungkan dimensi ekologis, sosial, dan spiritual dalam satu kesatuan sistem destinasi yang adaptif, produktif, dan restoratif.

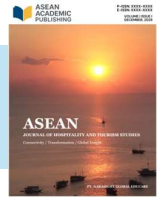
Secara konseptual, teori-teori tersebut juga menjembatani hubungan antara literatur dan pertanyaan penelitian. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana pariwisata dapat berperan sebagai agen regenerasi sosial-ekologis dalam konteks pasca-pandemi? Dengan kerangka teoritis ini, penelitian berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis literatur dan sintesis konseptual, sehingga menghasilkan kontribusi bagi pengembangan ilmu pariwisata dan kebijakan publik di kawasan ASEAN

4. Results and Discussion

4.1 Perubahan Paradigma: Dari Keberlanjutan Menuju Regenerasi

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi pergeseran paradigma besar dalam pemikiran pembangunan pariwisata global. Jika sebelumnya fokus utama berada pada *sustainable tourism* yang menekankan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, kini orientasi tersebut mulai bergeser menuju *regenerative tourism* yang berfokus pada pemulihan dan penciptaan nilai positif (Benessaiah & Boley, 2023). Pergeseran ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap relasi manusia dan alam. Dalam paradigma keberlanjutan, manusia diposisikan sebagai pengelola sumber daya alam yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan; sedangkan dalam paradigma regeneratif, manusia menjadi bagian integral dari sistem ekologis yang berperan aktif dalam memperbaharui kehidupan (Mang & Haggard, 2020).

Studi Hughes dan Scheyvens (2022) menegaskan bahwa pandemi COVID-19 menjadi katalis bagi transformasi paradigma tersebut. Krisis global memperlihatkan keterbatasan sistem pariwisata konvensional yang terlalu bergantung pada volume wisatawan dan pendapatan jangka pendek. Ketika mobilitas internasional berhenti total, banyak destinasi yang kehilangan sumber pendapatan utama dan mengalami disrupsi sosial. Namun, di sisi lain, kondisi ini membuka ruang refleksi dan rekonstruksi nilai. Muncul kesadaran baru



bahwa keberlanjutan tidak cukup hanya mengurangi kerusakan, tetapi harus mampu menciptakan kondisi yang mendukung regenerasi sosial-ekologis

Hasil kajian Pawson et al. (2022) menunjukkan bahwa praktik pariwisata regeneratif di Selandia Baru dan Costa Rica telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Misalnya, proyek restorasi hutan hujan tropis yang dikelola komunitas wisata lokal di Monteverde tidak hanya memperbaiki kualitas tanah dan air, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui ekowisata berbasis konservasi. Temuan serupa juga dijumpai pada program *coral regeneration* di Bali dan Raja Ampat yang menggabungkan partisipasi masyarakat lokal dengan wisata edukatif bagi wisatawan (UNDP Indonesia, 2024).

Selain itu, perubahan paradigma ini juga tampak dalam kebijakan nasional berbagai negara ASEAN. Pemerintah Indonesia, Thailand, dan Filipina mulai mengadopsi terminologi regeneratif dalam rencana strategis pariwisatanya (Mekinc & Potočnik Topler, 2021). Namun, pergeseran kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama dalam hal pengukuran dampak regeneratif dan perubahan perilaku pelaku industri. Oleh karena itu, transformasi paradigma ini belum dapat dikatakan sepenuhnya tercapai, tetapi menunjukkan arah baru menuju sistem pariwisata yang lebih inklusif dan adaptif.

Dengan demikian, perubahan paradigma dari keberlanjutan menuju regenerasi bukan sekadar perubahan terminologi, tetapi pergeseran mendalam dalam struktur nilai dan orientasi pembangunan pariwisata. Paradigma regeneratif menuntut cara berpikir baru tentang kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan keseimbangan hidup antara manusia, alam, dan budaya lokal.

4.2 Implementasi Regeneratif di Kawasan Asia Tenggara

Temuan literatur memperlihatkan bahwa implementasi pariwisata regeneratif di Asia Tenggara masih berada pada tahap awal, dengan variasi tingkat kemajuan antarnegara. Indonesia dan Thailand termasuk negara yang mulai serius mengintegrasikan prinsip regeneratif ke dalam kebijakan nasionalnya, sedangkan negara seperti Vietnam dan Kamboja masih berfokus pada tahap keberlanjutan dan mitigasi dampak (Mekinc & Potočnik Topler, 2021).

Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep regeneratif dapat dilihat pada pengembangan destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Di Labuan Bajo, misalnya, pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dalam program restorasi mangrove serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Kemenparekraf, 2023). Program ini berhasil meningkatkan kesadaran ekologis warga lokal dan memperbaiki kualitas lingkungan pesisir yang sebelumnya mengalami degradasi. Selain itu, muncul gerakan *eco-cultural tourism* yang menekankan pelestarian budaya lokal melalui kegiatan seni dan ritual tradisional yang diintegrasikan ke dalam paket wisata.

Di Thailand, model regeneratif diterapkan melalui *Bio-Circular-Green Economy Model (BCG)* yang dikembangkan oleh pemerintah sejak 2021. Model ini menggabungkan prinsip ekonomi sirkular dengan konservasi sumber daya alam dan inovasi teknologi hijau (Tourism Authority of Thailand, 2023). Beberapa destinasi seperti Chiang Mai dan Phuket telah menerapkan sistem manajemen energi berbasis komunitas dan pertanian organik yang mendukung rantai pasok pariwisata berkelanjutan. Sementara itu, di Filipina, konsep regeneratif mulai diterapkan di kawasan Pulau Siargao, di mana komunitas lokal berperan aktif dalam menjaga ekosistem hutan bakau serta menerapkan *waste-to-value program* yang



mengubah limbah organik menjadi kompos untuk mendukung pertanian lokal (UNWTO, 2023).

Namun demikian, tantangan implementasi tetap signifikan. Pertama, sebagian besar destinasi di Asia Tenggara masih menghadapi tekanan komersialisasi dan investor asing yang lebih menekankan profit daripada regenerasi. Kedua, rendahnya kapasitas teknis masyarakat dalam mengelola program berbasis lingkungan menjadi kendala utama dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang (Prayudi & Sari, 2023). Ketiga, kebijakan lintas sektor antara pariwisata, lingkungan hidup, dan pertanian masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga upaya integratif sulit tercapai.

Walau demikian, temuan ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk menjadi laboratorium alami bagi pengembangan pariwisata regeneratif dunia. Kekayaan biodiversitas, budaya, serta struktur sosial komunal yang kuat merupakan modal sosial-ekologis yang unik untuk mewujudkan model regenerasi yang autentik. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme kolaborasi regional yang mempertemukan aktor pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan indikator keberhasilan regeneratif yang sesuai dengan konteks Asia Tenggara.

4.3 Faktor Kunci Keberhasilan Regeneratif

Analisis tematik terhadap literatur menunjukkan sedikitnya empat faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan pariwisata regeneratif, yaitu (1) tata kelola kolaboratif, (2) kesadaran ekologis dan budaya, (3) inovasi ekonomi sirkular, dan (4) partisipasi masyarakat lokal.

Pertama, *tata kelola kolaboratif (collaborative governance)* menjadi pondasi penting bagi terciptanya sistem regeneratif. Cave dan Dredge (2020) menegaskan bahwa praktik regeneratif memerlukan bentuk tata kelola yang melibatkan aktor lintas sektor secara setara, bukan hierarkis. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, industri sebagai inovator, dan masyarakat sebagai pengelola langsung sumber daya. Studi Reed et al. (2021) menunjukkan bahwa destinasi yang berhasil menerapkan model kolaboratif—seperti Whistler (Kanada) dan Queenstown (Selandia Baru)—memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan efektivitas pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Kedua, *kesadaran ekologis dan budaya* menjadi elemen esensial dari regenerasi. Regenerasi tidak dapat terjadi tanpa perubahan kesadaran individu dan kolektif mengenai hubungan manusia dan alam (Ateljevic, 2021). Oleh karena itu, pendidikan wisata dan program interpretasi lingkungan menjadi kunci dalam membangun perilaku wisatawan yang lebih bertanggung jawab. Program seperti *eco-literacy tourism* di Ubud, misalnya, memberikan pelatihan langsung kepada wisatawan tentang daur ulang sampah dan konservasi air, yang berdampak pada peningkatan kesadaran ekologis jangka panjang (UNDP Indonesia, 2024).

Ketiga, *inovasi ekonomi sirkular* menyediakan kerangka operasional bagi industri pariwisata untuk mengurangi limbah, mengoptimalkan energi, dan memanfaatkan kembali sumber daya. Gössling dan Hall (2021) menyebut bahwa hotel-hotel yang mengadopsi sistem daur ulang dan sumber energi terbarukan tidak hanya menurunkan biaya operasional hingga 30%, tetapi juga memperkuat citra merek hijau di mata wisatawan global. Model ekonomi sirkular juga terbukti mampu membuka lapangan kerja baru di sektor daur ulang dan pertanian organik yang mendukung rantai pasok lokal.

Keempat, *partisipasi masyarakat lokal* menjadi inti regenerasi. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, setiap program regeneratif akan kehilangan legitimasi sosialnya. Penelitian Pawson et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata regeneratif di komunitas Māori didasarkan pada prinsip *whakapapa* (keterhubungan spiritual antara manusia dan alam)



yang menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Prinsip serupa juga ditemukan pada masyarakat adat di Kalimantan dan Flores, yang mengaitkan kegiatan wisata dengan ritual adat dan konservasi lahan (Prayudi & Sari, 2023).

Keempat faktor tersebut membentuk satu kesatuan sistemik yang saling mendukung. Tanpa tata kelola kolaboratif, inovasi ekonomi tidak akan berakar; tanpa kesadaran ekologis, regenerasi hanya menjadi jargon; dan tanpa partisipasi masyarakat, regenerasi tidak memiliki daya hidup jangka panjang.

4.4 Tantangan dan Arah Masa Depan Pariwisata Regeneratif

Walaupun potensi dan keberhasilan awal pariwisata regeneratif cukup menjanjikan, tantangan implementasi di lapangan masih besar. Hasil analisis menunjukkan sedikitnya empat tantangan utama: (1) lemahnya indikator pengukuran regeneratif, (2) kesenjangan kapasitas antaraktor, (3) kendala pendanaan, dan (4) resistensi struktural terhadap perubahan.

Pertama, belum adanya indikator baku untuk menilai sejauh mana destinasi telah mencapai kondisi regeneratif menjadi hambatan mendasar. Sebagian besar indikator yang ada masih berfokus pada aspek keberlanjutan, seperti konsumsi energi atau volume sampah, bukan pada proses pemulihan ekosistem dan kualitas sosial (Benessaiah & Boley, 2023). Hal ini menyebabkan sulitnya menilai keberhasilan regeneratif secara objektif.

Kedua, *kesenjangan kapasitas antaraktor* juga menjadi masalah utama. Pemerintah sering kali memiliki visi regeneratif, tetapi pelaku industri dan masyarakat lokal belum sepenuhnya memahami konsep tersebut. Prayudi dan Sari (2023) mencatat bahwa di Indonesia, pelatihan teknis dan pendampingan bagi pelaku pariwisata lokal masih sangat terbatas, sehingga banyak program regeneratif berhenti pada tahap perencanaan.

Ketiga, *kendala pendanaan* sering kali menghambat implementasi proyek regeneratif yang memerlukan investasi jangka panjang. Program restorasi ekosistem, misalnya, membutuhkan dana besar untuk penelitian, rehabilitasi, dan monitoring berkelanjutan. Oleh karena itu, mekanisme pendanaan alternatif seperti *green financing* dan *impact investment* perlu diperkuat (UNDP Indonesia, 2024).

Keempat, *resistensi struktural* terhadap perubahan juga tidak dapat diabaikan. Banyak aktor industri masih berpikir dalam kerangka pertumbuhan ekonomi tradisional dan enggan mengubah model bisnis yang telah lama menguntungkan mereka. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara paradigma regeneratif dan logika kapitalistik dalam industri pariwisata global (Higgins-Desbiolles, 2020).

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, arah masa depan pariwisata regeneratif harus mengutamakan tiga strategi besar: (1) integrasi kebijakan lintas sektor, (2) penguatan kapasitas dan literasi ekologis, serta (3) pengembangan model bisnis berbasis komunitas.

Pertama, integrasi kebijakan lintas sektor diperlukan agar regenerasi tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pariwisata, tetapi juga bagian dari kebijakan lingkungan, pertanian, dan pendidikan. Kedua, peningkatan literasi ekologis melalui kurikulum pendidikan, pelatihan industri, dan program wisata edukatif akan membentuk kesadaran ekologis kolektif. Ketiga, pengembangan model bisnis komunitas berbasis nilai-nilai lokal dan spiritualitas ekologis dapat menjadi dasar untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem (Ateljevic, 2021).

Dengan demikian, masa depan pariwisata regeneratif bergantung pada kemampuan kolektif masyarakat global untuk beralih dari logika “mengelola sumber daya” menuju “menghidupkan kembali kehidupan.” Regenerasi bukan sekadar strategi pasca-pandemi,



melainkan jalan menuju sistem pariwisata yang benar-benar mendukung keberlanjutan bumi dan kemanusiaan

5. Conclusion

Kajian ini menegaskan bahwa *pariwisata regeneratif* merupakan evolusi konseptual dari *pariwisata berkelanjutan*, yang menempatkan tujuan pembangunan tidak hanya pada pengurangan dampak negatif, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang memulihkan dan menumbuhkan kembali kehidupan sosial-ekologis. Jika keberlanjutan berfokus pada menjaga keseimbangan, maka regenerasi berfokus pada penciptaan kesejahteraan bersama bagi manusia dan alam (Benessaiah & Boley, 2023). Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang memperlihatkan keterbatasan sistem pariwisata lama yang berorientasi pertumbuhan, dan sekaligus membuka ruang bagi munculnya paradigma baru yang lebih adaptif, kolaboratif, serta berakar pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan ekologis (Hughes & Scheyvens, 2022).

Secara empiris, praktik regeneratif di berbagai negara menunjukkan hasil nyata. Inisiatif seperti restorasi mangrove di Labuan Bajo dan regenerasi terumbu karang di Raja Ampat (UNDP Indonesia, 2024) menjadi bukti bahwa model wisata berbasis pemulihan lingkungan dapat berjalan berdampingan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program *eco-farming tourism* di Chiang Mai, Thailand, dan *community-led regeneration* di Selandia Baru juga memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat lokal adalah kunci utama keberhasilan transformasi pariwisata (Pawson et al., 2022). Keberhasilan tersebut memperkuat gagasan bahwa regenerasi bukan hanya strategi lingkungan, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi yang memperkuat kohesi komunitas dan identitas budaya.

Dari hasil analisis, terdapat empat faktor utama penentu keberhasilan pariwisata regeneratif, yaitu: (1) tata kelola kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat; (2) kesadaran ekologis dan budaya; (3) inovasi ekonomi sirkular; dan (4) partisipasi aktif masyarakat lokal (Cave & Dredge, 2020; Reed et al., 2021). Faktor-faktor ini saling terkait dan menciptakan sistem adaptif yang memungkinkan destinasi wisata bertransformasi menjadi ruang hidup yang memulihkan. Sebaliknya, tanpa integrasi antaraktor, pariwisata regeneratif berisiko berhenti pada tataran konsep dan tidak memberi dampak nyata.

Meski potensinya besar, implementasi pariwisata regeneratif masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan indikator pengukuran, kesenjangan kapasitas teknis, serta resistensi ekonomi terhadap perubahan model bisnis lama (Prayudi & Sari, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor dalam kebijakan publik, peningkatan literasi ekologis melalui pendidikan dan pelatihan, serta skema pembiayaan berkelanjutan berbasis masyarakat seperti *impact investment* atau *green funding*.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antara keberlanjutan dan regenerasi sebagai dua tahap evolutif dalam pembangunan pariwisata. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan industri untuk merancang strategi pembangunan destinasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas ekologis dan sosial jangka panjang. Dengan demikian, pariwisata di masa depan tidak lagi sekadar aktivitas ekonomi, melainkan proses kolektif untuk memulihkan harmoni antara manusia dan alam demi keberlanjutan kehidupan di bumi.

Acknowledgments

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih



secara khusus disampaikan kepada para akademisi dan peneliti di bidang pariwisata berkelanjutan dan regeneratif, yang karya ilmiahnya menjadi fondasi konseptual bagi analisis dalam penelitian ini.

Penghargaan juga diberikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) atas tersedianya berbagai laporan dan kebijakan publik yang memberikan data relevan mengenai arah pembangunan pariwisata berkelanjutan nasional. Terima kasih pula disampaikan kepada lembaga internasional seperti UNWTO (United Nations World Tourism Organization) dan UNDP Indonesia yang telah menyediakan publikasi dan dokumen terbuka yang memperkaya kajian empiris penelitian ini.

Penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan sejawat dan reviewer akademik yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penyempurnaan naskah, serta kepada pihak-pihak di lingkungan akademik yang mendorong pengembangan riset pariwisata berbasis nilai-nilai regeneratif.

Akhirnya, penelitian ini didedikasikan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pariwisata yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Semua pandangan dan interpretasi yang tertuang dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

References

- Ateljevic, I. (2021). Transforming the (tourism) world for good and (re)generating the potential 'new normal'. *Tourism Geographies*, 23(3), 467–475. <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1888345>
- Narotama, N. (2017). Tumpek Wariga As an Ecology Based Local Genius in Supporting Sustainable Tourism (Case Study of Plaga Village, Badung, Bali)
- Benessaiah, K., & Boley, B. B. (2023). Regenerative tourism and the future of destinations. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(4), 651–670. <https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2141568>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2015). Towards new research on sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(1), 1–8. <https://doi.org/10.1080/09669582.2014.978516>
- Cave, J., & Dredge, D. (2020). Regenerative tourism needs diverse economic practices. *Annals of Tourism Research*, 84, 102–107. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102990>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Gössling, S., & Hall, C. M. (2021). Sustainable hospitality and tourism after COVID-19: Resetting industry goals. *Journal of Cleaner Production*, 291, 125–127. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125142>
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(3), 610–623. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748>
- Hughes, E., & Scheyvens, R. (2022). Toward transformative and regenerative tourism: A future-oriented framework. *Tourism Management Perspectives*, 44, 101027. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.101027>
- Kemenparekraf. (2023). *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional*



- (RIPPARNAS). Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Suryasih, I.A. (2021) Strategi Pengembangan Wisata Sejarah Di Daya Tarik Wisata Candi Sumberawan, Kabupaten Malang, Jawa Timur
- Lew, A. A., Cheer, J. M., & Haywood, M. (2020). Resilience and transformation in tourism. *Tourism Geographies*, 22(3), 507–528. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1760113>
- Mang, P., & Haggard, B. (2020). *Regenerative development and design: A framework for evolving sustainability*. John Wiley & Sons.
- Mekinc, J., & Potočnik Topler, J. (2021). Sustainable tourism development in post-COVID era: Lessons from ASEAN. *Sustainability*, 13(19), 11029. <https://doi.org/10.3390/su131911029>
- Niewiadomski, P. (2020). COVID-19: From temporary de-globalization to a re-discovery of tourism as local phenomenon. *Tourism Geographies*, 22(3), 651–656. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757747>
- Narotama, N. (2023). The Involvement of Local Community in The Tourist Attractions of Baliwoso Upadesa, Pengotan, Bangli.
- Pawson, E., McIntyre, N., & Carr, A. (2022). Regenerative tourism in practice: Lessons from community-led initiatives. *Tourism Recreation Research*, 47(2), 189–203. <https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1890471>
- Pollock, A. (2019). The rise of regenerative tourism. *Green Destinations Journal*, 5(1), 12–18.
- Prayudi, I. G., & Sari, N. M. (2023). Tantangan implementasi pariwisata regeneratif di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan Indonesia*, 5(2), 45–59.* <https://doi.org/10.47532/jpbi.v5i2.2023>
- Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.
- Reed, M. G., White, R., & Morrison, C. (2021). Collaborative governance for sustainable and regenerative tourism. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 23(4), 583–600. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1873758>
- Tourism Authority of Thailand. (2023). *Thailand BCG Tourism Framework 2023–2026*. Bangkok: TAT.
- UNDP Indonesia. (2024). *Sustainable and regenerative tourism initiative report*. Jakarta: United Nations Development Programme.
- UNWTO. (2023). *Tourism for people, planet and prosperity*. Madrid: World Tourism Organization. <https://www.unwto.org>

Author Profile: Ahmad Sadam Anggaraksa merupakan mahasiswa Sarjana Pariwisata di Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, yang sedang menyelesaikan studinya dengan skripsi “Strategi Pemasaran “Luxury Tourism” di Bali National Golf Villas, Nusa Dua Bali”. Penulis dapat dihubungi melalui email : sadamanggaraksa@gmail.com